



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2010 - 2014**

KEMENTERIAN SOSIAL RI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur Telp. (021) 8017146, Fax. (021) 801726

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NOMOR: 35/PLBKS/SK/08/2013

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin pembangunan kesejahteraan sosial berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan adanya rencana strategis;

b. bahwa rencana strategis tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi setiap penyelenggaraan penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tentang Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91);
15. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Nomor 17/BKS/07/2012 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2010 - 2014**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2010-2014 sebagai acuan bagi setiap penyelenggara penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- (2) Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab.I tentang Pendahuluan;
- b. Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
- c. Bab III tentang Strategis, Kebijakan dan Program; dan
- d. Bab IV tentang Penutup.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam kegiatan jangka menengah di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Tahunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Agustus 2013.

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DWI HERU SUKOCO

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Review Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010 - 2014 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Sebagaimana diketahui, bahwa perubahan sosial dewasa ini, baik disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal berlangsung sangat cepat. Terjadinya perubahan sosial tersebut pada kenyataannya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi semakin kompleks dan menuntut berbagai bentuk dan jenis pelayanan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang saat ini menjadi isu nasional maupun isu Kementerian Sosial yaitu kemiskinan, ketelantaran, tindak kekerasan, perdagangan orang, disorganisasi sosial dan penyalahgunaan napza. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut memerlukan penanganan secara terarah, sistematis, cepat dan tepat.

Sebagai respon atas kondisi tersebut di atas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial melaksanakan review Renstra tahun 2010-2014. Langkah ini ditempuh juga dalam rangka menyesuaikan dengan Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, serta penajaman-penajaman pada strategi dan indikator capaian kegiatan pada tahun 2013-2014. Diharapkan Renstra yang sudah direview ini, akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kegiatan kelitbang.

Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih kepada tim perumus, nara sumber dan pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya review Renstra ini. Semoga kerjasama yang telah terbangun dengan baik dalam pelaksanaan review ini dapat dilanjutkan dan berkesinambungan.

Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial

DR. Dwi Heru Sukoco, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN - PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | i |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 KONDISI UMUM | 1 |
| 1.1.1 Perkembangan Lingkungan Strategis | 1 |
| a. Isu Global..... | 1 |
| b. Isu Nasional | 3 |
| c. Isu Kementerian Sosial | 5 |
| 1.1.2 Perkembangan Organisasi | 7 |
| 1.2 SUMBANGSIH DAN PERKEMBANGAN PUSLITBANGKESOS PERIODE 2005 - 2009 | 9 |
| 1.2.1 Sumber Daya Puslitbangkesos | 9 |
| 1.2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) | 9 |
| 1.2.1.2 Anggaran | 12 |
| 1.2.1.3 Sarana dan Prasarana | 13 |
| 1.2.2 Kegiatan Puslitbangkesos dan Capaian | 14 |
| 1.2.2.1 Penelitian | 14 |
| 1.2.2.2 Publikasi | 15 |
| 1.2.2.3 Kerjasama | 15 |
| 1.2.2.4 Perencanaan Program | 17 |
| 1.2.2.5 Analisis Kebutuhan | 17 |
| 1.2.2.6 Operasional Perkantoran | 18 |
| 1.2.2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia | 18 |
| 1.2.3 Indikator Kinerja Hasil/Outcome | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN | 19 |
| 1.3.1 Perkembangan dan Kedudukan Kelembagaan - Puslitbangkesos | 19 |
| 1.3.2 Isu-isu Masa Kini dan Masa Depan | 19 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | 29 |
| 2.1. Visi | 29 |
| 2.2. Misi | 30 |
| 2.3. Tujuan | 30 |
| 2.4. Sasaran Strategis | 30 |
| 2.5. Indikator Kinerja | 31 |
| BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN | 33 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 33 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial | 34 |
| 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Puslitbangkesos | 34 |
| 3.3.1 Kebijakan Puslitbangkesos | 37 |
| 3.3.2 Strategi Puslitbangkesos | 38 |
| 3.3.3. Kegiatan Puslitbangkesos | 39 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| LAMPIRAN 1: Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Anggaran | 47 |

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Diagram 1. | Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007 & 2010 | 10 |
| Diagram 2. | Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2007 dan 2010 | 11 |
| Diagram 3. | Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2007 dan 2010 | |
| Diagram 4. | Alokasi Anggaran Puslitbangkesos Tahun 2007-2010 (dalam Juta Rupiah) | 13 |
| Tabel 1. | Komposisi Peneliti Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional | 12 |
| Tabel 2. | Jumlah Hasil Penelitian Puslitbangkesos Periode 2006 - 2010 | 14 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Perkembangan Lingkungan Strategis

Berbagai isu global dan nasional yang diperhitungkan akan dihadapi dan menjadi tantangan nasional yang akan mempengaruhi dan akan diperhatikan Puslitbangkesos dalam program 2010-2014 adalah beberapa hal, seperti yang diuraikan berikut :

a. Isu Global.

Berbagai isu global sampai dengan tahun 2009, yang diperhitungkan masih/akan menjadi isu penting dalam periode 2010-2014 dan dalam beberapa dekade mendatang adalah:

1) Millenium Development Goals (MDGs)

Indonesia sebagaimana sebagian besar negara di dunia telah bersepakat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia, terutama dalam hal menjaga lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati, kesehatan, pangan, menurunkan angka kemiskinan, dan peningkatan peran perempuan, akan mempengaruhi program dan menjadi perhatian kegiatan Puslitbangkesos di masa depan.

Berdasarkan laporan Bappenas (2010) tentang tinjauan pencapaian target MDGs dari delapan target MDGs, target penanggulangan kemiskinan telah tercapai pada indikator proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 USD perkapita per hari telah tercapai pada tahun 2008 (5,90%) sedangkan target MDGs pada tahun 2015 (10,30%) ini merupakan tantangan tersendiri bagi Puslitbangkesos untuk mengungkapkan dibalik data kemiskinan tersebut.

2) Perubahan Iklim Global (*Climate Change*) dan Lingkungan

Pemanasan global dan variabilitas iklim telah menjadi isu global dan dampaknya telah dirasakan di Indonesia. Skenario iklim bila tingkat emisi terus meningkat akan mengakibatkan berbagai daerah mengalami peningkatan temperatur, sedangkan beberapa bagian lain akan mengalami peningkatan curah hujan ekstrem yang makin sering. Meskipun Puslitbangkesos bergerak pada ranah penelitian sosial kemanusiaan namun dengan adanya perubahan iklim dan lingkungan sangat mempengaruhi perubahan perilaku manusia dan perubahan sosial dan akhirnya menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial baru.

Kerawanan akibat perubahan iklim mencakup ketersediaan air, pangan, ancaman peningkatan bencana alam, dan kekeringan. Diperlukan strategi besar dan komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan manajemen bencana-perubahan iklim dan pengurangan kemiskinan. Konflik berbasis kompetisi akses terhadap sumber daya alam, baik sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya terbarukan lainnya akan meningkat. Oleh karena menjadi sangat strategis bagi Puslitbangkesos untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim global dan lingkungan.

3) Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap munculnya permasalahan kesejahteraan sosial baru maupun sebagai sarana pemecahan masalah kesejahteraan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi penyandang tuna netra bisa berkomunikasi dengan sesama penyandang tuna netra di belahan bumi lainnya maupun penyandang tuna netra dapat menambah ilmu pengetahuannya tanpa harus pergi ke perpustakaan hanya dengan memanfaatkan internet namun di sisi lain berbagai kasus trafficking dan transaksi narkoba bisa dilakukan dengan memanfaatkan internet, demikian juga dengan pengumpulan dana sosial melalui undian berhadiah dengan maraknya penggunaan *Handphone* masyarakat banyak mengeluhkan terjadinya penipuan yang mengataskan namakan undian berhadiah. Munculnya permasalahan sosial yang disebabkan teknologi informasi dan komunikasi ini maka semestinya Puslitbangkesos mulai meneliti tentang berbagai hal tersebut.

b. Isu Nasional

Bencana Alam hal yang perlu dicatat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada periode 2005-2009, diwarnai dengan terjadi berbagai bencana alam yang sangat besar. Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana besar yang diakibatkan oleh gempa bumi raksasa berkekuatan $M=9.2$ SR yang berpusat di perairan Aceh dan menimbulkan tsunami raksasa yang menghempas wilayah pantai di kawasan Lautan Hindia. Bencana ini merenggut lebih dari dua ratus ribu jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Bencana ini kemudian diikuti oleh gempa bumi Nias yang berkekuatan $M=8.7$ SR yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005, gempa bumi Yogyakarta (2006), tanah (*subsidence*),

terjadi banjir rob. Selain itu, di berbagai tempat akibat curah hujan yang tinggi telah menyebabkan banjir. Seluruh bencana alam di atas telah menambah penderitaan bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 2010 ini Indonesia juga terjadi 3 bencana alam yang hampir bersamaan yaitu bencana di Wasior, gempa dan Tsunami di Mentawai dan erupsi gunung merapi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Pelaksanaan otonomi daerah juga berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, kewenangan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, termasuk yang menentukan apakah pembangunan kesejahteraan sosial merupakan prioritas pembangunan daerah atau tidak, dengan indikator besar kecilnya prosentase anggaran pembangunan kesejahteraan sosial dan status Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kesejahteraan sosial di daerah.

Pelaksanaan demokrasi dengan pemilihan langsung kepala daerah juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, seringkali untuk menarik simpati pemilih calon kepala daerah berkampanye dengan menggunakan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial, seperti penanggulangan kemiskinan, pemberian santunan kepada lanjut usia dan anak yatim. Pada satu sisi berbagai bentuk santunan oleh calon kepala daerah tersebut membuat beberapa masyarakat yang selama ini belum pernah disantuni akibat terbatasnya anggaran pemerintah pada sisi lain program pemberian santunan tersebut membuat semakin besar tuntutan masyarakat pada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat tersebut.

c. Isu Kementerian Sosial

Adanya Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memposisikan tanggung jawab kesejahteraan sosial berada pada negara dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan ruang tersendiri bagi Puslitbangkesos untuk berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Masalah-masalah sosial tersebut ditangani melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Kementerian Sosial lebih diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- 2) Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk:
 - a) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar,

lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

3) Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:

- a) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

- 4) Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Dengan demikian fokus dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbangkesos harus memprioritaskan penelitian dan pengembangan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang menjadi prioritas Kementerian Sosial dengan berbagai penanganan masalah kesejahteraan sosial baik bersifat memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

1.1.2 Perkembangan Organisasi

Kehadiran Puslitbangkesos saat ini, bermula dari dibentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial (Balitbangsos-eselon I) pada tahun 1975. Badan tersebut membawahi dua pusat penelitian yaitu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) dan Pusat Penelitian Metode dan Teknologi Pekerjaan Sosial (Puslit MTPS). Tahun 1979, Balitbangsos pindah dari Jl. Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat ke Jl. Tanah Abang Timur No.15 Jakarta Pusat.

Pada perkembangannya, terjadi perubahan nomenklatur dan eselonisasi di lingkungan Balitbangsos, yaitu: tahun 1983, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No.15 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depsos, Puslitbangkesos dan Puslit MTPS berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial (Puslitbang RBS)

serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos). Tahun 1987 Depsos, termasuk Balitbangsos pindah ke Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat. Berdasarkan Kepmensos No.27/Huk/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depsos, Balitbangsos berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Balitbangkessos) dengan membawahi dua pusat penelitian yaitu: Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial (Puslit PKS) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial (Puslitbang UKS).

Tahun 1999, pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdul Rahman Wahid (Kabinet Persatuan), berdasarkan Kepres No.152, Departemen Sosial dibubarkan dan berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). Puslit PKS dan Puslitbang UKS dilebur menjadi satu dengan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kessos-eselon II) dibawah Deputi IV. Ketika Departemen Sosial digabung dengan Departemen Kesehatan R.I. (Depkes dan Kessos, 2001), nomenklatur dan eselonisasi Puslitbangkesos tetap dipertahankan.

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (Kabinet Gotong Royong, 2001) Departemen Sosial dihidupkan kembali, berdasarkan Kepmensos Nomor 06/HUK/2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depsos. Bersamaan itu, dihidupkan pula dua pusat penelitian yang pernah ada yaitu: Puslit PKS dan Puslitbang UKS, di bawah Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial (Balatbangsos-eselon I).

Pada tahun 2005, melalui Peraturan Menteri Sosial RI No. 82/HUK/2005, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depsos, Puslit PKS dan Puslitbang UKS dilebur kembali menjadi satu unit eselon II, yaitu Puslitbangkesos sebagai salah satu

unit litbang Departemen Sosial selain Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas) dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) mempunyai fokus penelitian yang berbeda antara unit Penelitian di bawah koordinasi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklit Kesos- eselon I) hingga saat ini, yang operasional secara penuh sejak 12 Juni 2006, dan pindah dari Jl. Salemba Raya No. 28 ke Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III, Jakarta Timur.

Pada tahun 2010 ada perubahan nama dari Departemen Sosial RI menjadi Kementerian Sosial RI. Seiring perubahan tersebut dalam organisasi Puslitbangkesos ada perubahan yaitu terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penjamin Mutu dan Bidang Kerjasama dan Diseminasi. Perubahan pada organisasi Badiklitkesos juga mengalami perubahan dengan di tiadakan Pusbangtansosmas sehingga hal ini akan mempengaruhi perubahan pada tubuh Puslitbangkesos. Dengan adanya perubahan ini maka akan mempengaruhi rencana strategis yang akan disusun untuk tahun 2010-2014.

1.2 SUMBANGSIH DAN PERKEMBANGAN PUSLITBANGKESOS PERIODE 2005–2009

1.2.1 Sumber Daya Puslitbangkesos

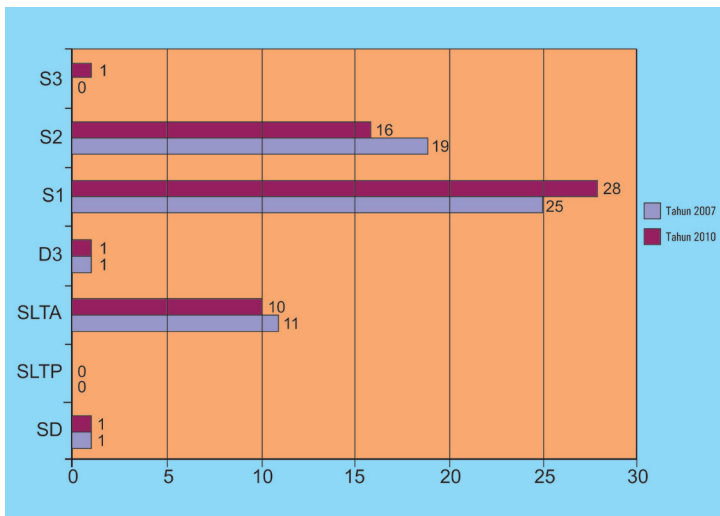
1.2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama periode tersebut, Puslitbangkesos tiap tahun menerima pegawai baru untuk mengisi berbagai formasi baik pada jabatan fungsional peneliti maupun untuk staf, yakni sebanyak 12 orang. Akan tetapi, dalam periode tersebut Puslitbangkesos juga kehilangan tenaga berpengalaman karena pensiun dan meninggal dunia. Hingga awal tahun 2010 jumlah

pegawai Puslitbangkesos mencapai 60 orang yang tersebar di 3 bidang/bagian dan jabatan fungsional.

Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan pada tahun 2010, sebagian besar berpendidikan S1 sedangkan pegawai dengan berpendidikan S.2 mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar penerimaan pegawai baru adalah berpendidikan S1 sedangkan pegawai yang berpendidikan S2 pensiun dan meninggal dunia.

Diagram 1. Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007 & 2010



Apabila dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan kelompok umur adalah terjadi peningkatan komposisi pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun dan kelompok umur 51-65 tahun, sedangkan sebaliknya pada kelompok umur 31-40 dan 41-50 tahun, penambahan kelompok umur 51-65 tahun perlu diantisipasi dengan pengusulan penerimaan pegawai

baru karena pegawai pada kelompok tersebut beberapa tahun mendatang akan pensiun.

Diagram 2. Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2007 dan 2010

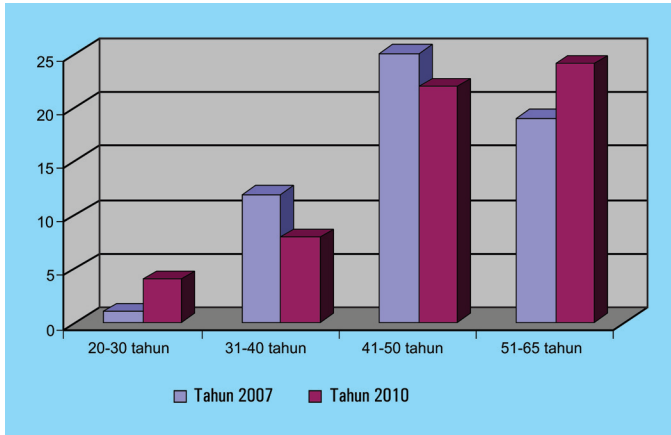
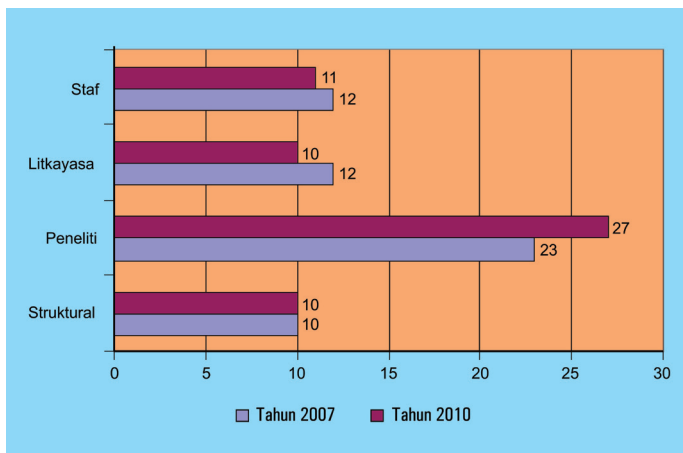


Diagram 3. Perbandingan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2007 dan 2010



Apabila dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan jabatan maka sebagian besar menduduki jabatan sebagai fungsional peneliti dan litkayasa. Jika dilihat tugas pokok dan fungsi Puslitbang, kondisi ini cukup ideal karena sebagian besar pegawai merupakan pejabat fungsional Peneliti dan Litkayasa. Perkembangan lembaga ke depan perlu regenerasi pejabat fungsional peneliti karena apabila dilihat dari umur maka sebagian besar pada kelompok umur 41-50 dan 51-65 tahun dengan menduduki jabatan fungsional peneliti muda dan madya.

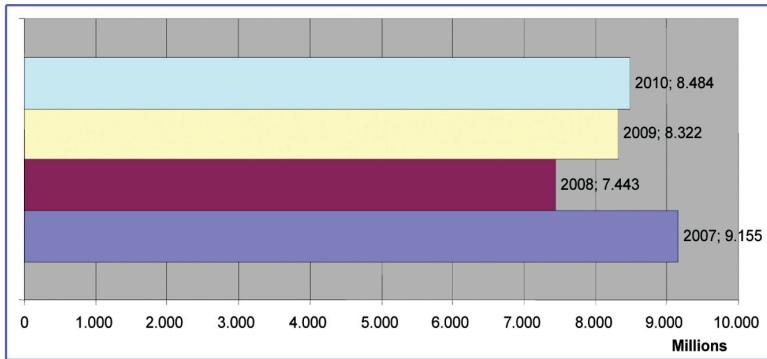
Tabel 1. Komposisi Peneliti Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional Tahun 2010

| No | Jabatan Fungsional Peneliti | Jumlah | Prosentase (%) |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Peneliti Pertama | 5 | 19,23 |
| 2 | Peneliti Muda | 8 | 30,77 |
| 3 | Peneliti Madya | 13 | 50 |
| 4 | Peneliti Utama | 0 | 0 |
| Total | | 26 | 100 |

1.2.1.2 Anggaran

Anggaran Puslitbangkesos mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut dialokasikan untuk penyesuaian standar biaya umum, biaya operasional dan kenaikan gaji PNS. Dengan demikian alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian tidak mengalami kenaikan sehingga seringkali kegiatan penelitian belum dilaksanakan secara maksimal. Berbagai penelitian yang semestinya memerlukan responden penelitian di beberapa provinsi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

**Diagram 4. Alokasi Anggaran Puslitbangkesos
Tahun 2007-2010 (dalam Juta Rupiah)**



Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran penelitian melalui Dana Hibah Dikti pada tahun 2009 sebesar Rp.50.000.000/peneliti yang dilaksanakan dalam 7 judul penelitian dengan melibatkan antara 4 s/d 5 peneliti setiap judul. Pada tahun 2010 dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan nama Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa sebesar Rp. 31.000.0000/peneliti dalam 4 judul penelitian, dengan melibatkan antara 3 s/d 7 peneliti setiap judul.

1.2.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari aset/barang milik negara (BMN). Cakupan aset selain berupa tanah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Aset yang tercatat dalam BMN terdiri dari aset tetap, dan tidak tetap senilai Rp 2.344.936.252 adapun fasilitas gedung kantor Puslitbangkesos dengan luas 1.400 m² milik Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial UP. Biro Umum.

1.2.2 Kegiatan Puslitbangkesos dan Capaian

Berangkat dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada potensi yang dimiliki, maka untuk periode 2005-2009, Puslitbangkesos telah melaksanakan program dengan capaian penting sebagai berikut:

1.2.2.1 Penelitian

Puslitbangkesos sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, hasil capaian dari pelaksanaan penelitian dari tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah Hasil Penelitian Puslitbangkesos
Periode 2006 - 2010**

| Tahun | Jenis Penelitian | | | Bidang | | | | Lokasi (Prov) |
|--------------|------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| | Ekspe- rimen | Non Ekspe- rimen | Evaluasi | Yan rehsos | Banjam sos | Dayasos | Pola Konsen- trasi | |
| 2006 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| 2007 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 2009 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 2010 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Total | 4 | 25 | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | 77 |

Catatan: Pada tahun 2007 dilaksanakan penelitian pelayanan sosial bagi TKI di Malaysia

Apabila dilihat dari jenis penelitian maka pada kurun waktu 2005-2010 penelitian yang dilakukan oleh Puslitbangkesos adalah penelitian non eksperimen. Dilihat dari bidang penelitian berdasarkan unit teknis yang ada di Kementerian Sosial, maka konsentrasi penelitian lebih ditekankan pada bidang pemberdayaan sosial. Tahun 2008 sampai saat ini dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pola konsentrasi pembangunan

kesejahteraan sosial di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan antar negara. Sebaran lokasi penelitian Puslitbang rata-rata tiap tahun hanya mampu menjangkau kurang dari 50% provinsi yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia.

1.2.2.2 Publikasi

Publikasi hasil penelitian Puslitbangkesos merupakan produk dari Puslitbangkesos berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, kajian informasi permasalahan sosial dan usaha kesejahteraan sosial, buku executive summary, leaflet, poster, ekspose media, diseminasi hasil penelitian baik di daerah maupun di pusat, pameran, dan pendistribusian produk Puslitbangkesos serta website: <http://www.puslit.kemosos.go.id>. Publikasi mengadakan seminar untuk membahas hasil penelitian tersebut dengan melibatkan para pakar ilmuan dari universitas, LSM dan pembuat keputusan di unit teknis terkait dengan penelitian. Publikasi berupa penerbitan buku hasil penelitian mulai tahun 2009 dilakukan melalui *publishing house* P3KS Press sehingga angka kredit dari hasil penelitian tersebut lebih banyak dibanding dengan tanpa menggunakan *publishing house*. Demikian juga dengan jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sejak tahun 2008 telah terakreditasi oleh LIPI dengan nilai akreditasi B.

1.2.2.3 Kerjasama

Kegiatan kerjasama telah dilakukan dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, pemerintah daerah, unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial maupun dengan NGO dan instansi lain. Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerja sama adalah: Universitas Hasanuddin, IPB, UI, Universitas

Andalas, UNIDA Bogor, UIN dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salah satu kegiatan kerjasama dengan swasta yang telah dilakukan dengan PT. Dunamis, PT Tempo dan Kompas. Beberapa Unit Teknis juga telah bekerja sama baik secara kelembagaan maupun dalam pelibatan SDM Puslitbangkesos dalam berbagai kegiatannya. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan yaitu dengan Inspektorat Jenderal dalam rintisan penyusunan instrument bersama, kegiatan ini belum selesai / tuntas.

Beberapa kegiatan penelitian kerjasama yang pernah dilakukan adalah Kajian Sekuritas Sosial bagi Keluarga Miskin bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (2005) dan Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasan yang Berbasis Institusi Lokal di Sumatera Barat bekerjasama dengan Universitas Andalas (2006), Penelitian Uji Coba Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Pelabuhan Ratu (2008).

Tahun 2008 dilakukan penelitian pola konsentrasi wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal yaitu di Pulau Miangas Sulawesi Utara dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, kegiatan ini merupakan kerjasama berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan Puslitbangkesos berperan dalam hal penelitian dan pemetaan permasalahan sosial juga memanfaatkan jejaring kerja membangun kemitraan dengan berbagai sumber di wilayah tersebut. Untuk 2009 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan komitmen kelembagaan untuk mendukung kontrak kerja Menteri Sosial dalam penanganan 50 Kabupaten Tertinggal. Puslitbangkesos ikut berperan terutama dalam memetakan permasalahan dan potensi sebagai dasar intervensi yang akan dilakukan oleh unit teknis.

Dalam hal pendanaan penelitian, Puslitbangkesos sejak tahun 2009 memanfaatkan dana insentif riset untuk peneliti dan perekayasa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pada tahun 2010 dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Puslitbangkesos juga berperan aktif dalam forum komunikasi kelitbangan (FKK) yang merupakan sarana bertukar informasi antar lembaga kelitbangan kementerian/lembaga, membangun aliansi strategis terhadap permasalahan bersama dan pengembangan SDM.

1.2.2.4 Perencanaan Program

Perencanaan program Puslitbangkesos tiap tahun telah berhasil menyusun program dan anggaran Puslitbangkesos sehingga menghasilkan dokumen DIPA tiap tahunnya. Ada berbagai kendala dalam penyusunan program dan anggaran karena keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan kepada Puslitbangkesos sehingga berbagai kegiatan dirasakan kurang maksimal dalam hal penganggarannya. Selain itu pada periode ini belum berhasil menyusun standar biaya khusus penelitian.

1.2.2.5 Analisis Kebutuhan

Pada periode tahun 2005-2009, analisis kebutuhan penelitian dilakukan dengan 2 pola yaitu pelaksanaan analisis kebutuhan di daerah untuk menginventarisasi tema-tema penelitian yang merupakan kebutuhan daerah dan inventarisasi tema-tema penelitian di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil dari inventarisasi tema-tema penelitian tersebut semestinya menjadi kerangka acuan untuk menyusun rencana penelitian yang akan dilakukan.

1.2.2.6 Operasional Perkantoran

Operasional perkantoran meliputi pembayaran gaji, jamuan tamu, perjalanan dinas Puslitbangkesos, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, pembelian ATK, tenaga pramubhakti dan tenaga pengemudi. Pada periode ini terdapat peningkatan sarana perkantoran yang memerlukan pemeliharaan.

1.2.2.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas pegawai berupa pengiriman pegawai pada pendidikan formal dilakukan melalui jalur izin belajar dan tugas belajar. Pada periode 2005-2010 Puslitbangkesos mengirimkan 2 pegawai untuk menempuh pendidikan Strata 3 (S3) di Malaysia dan dalam negeri sedangkan untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2) Puslitbangkesos mengirim 4 pegawai untuk tugas belajar di dalam negeri.

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pengiriman pegawai pada berbagai diklat seperti Diklat PIM III, Diklat Fungsional Peneliti, Diklat Perpustakaan dan lain sebagainya.

1.2.3 Indikator Kinerja Hasil/Outcome

Capaian kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan akumulasi dari luaran kegiatan dalam periode ini, sampai saat ini masih menunjukkan angka sekitar 80-90%. Artinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puslitbangkesos tidak seluruhnya mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini utamanya disebabkan oleh minimnya anggaran litbang yang diterima oleh Puslitbangkesos, dan kurang sesuai dengan rencana pendanaan awal sehingga beberapa kegiatan memang tertunda dan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Walaupun menghadapi kendala anggaran yang sulit, dampak dari berbagai kegiatan Puslitbangkesos seperti yang disampaikan di atas telah dirasakan oleh berbagai pihak baik pada kelompok usaha maupun stakeholders lainnya. Pengaruh kegiatan Puslitbangkesos pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan bangsa, pada hubungan dengan bangsa lain dalam bidang ilmu pengetahuan, dan pada ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pengaruh berbagai hasil litbang tersebut di atas.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Perkembangan dan Kedudukan Kelembagaan Puslitbangkesos

Permasalahan Puslitbangkesos hampir sama dengan permasalahan unit litbang kementerian/lembaga lainnya. Seperti minimnya alokasi anggaran untuk Puslitbangkesos dan seringkali kurang dipakainya rekomendasi hasil penelitian pada pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi dengan user dan lain sebagainya.

Puslitbangkesos merupakan satu dari dua unit litbang yang masih ada di Kementerian Sosial selain Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menurut Renstra Kementerian Sosial 2010-2014, Puslitbangkesos melakukan penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.

1.3.2 Isu-isu Masa Kini dan Masa Depan

Permasalahan kesejahteraan sosial bukannya berkurang akan tetapi kian lama persoalan semakin kompleks. Berbagai upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial telah

dilakukan baik yang bersifat rehabilitatif, kuratif, preventif dan developmental. Untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan sasaran maka diperlukan bahan perumusan kebijakan berupa hasil penelitian dan pengembangan.

Isu-isu masa kini dan masa depan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

a. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS per Maret 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42 persen). Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebanyak 36,10 juta jiwa (16,66 persen). Berarti selama tahun 2004-2008 terjadi penurunan sebesar 1,14 juta jiwa (3,15 persen). Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

- 1) Kejadian bencana alam sepanjang tahun 2005-2008;
- 2) Terjadinya krisis ekonomi global, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak

terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;

3) Kejadian bencana sosial, seperti korban konflik sosial.

Jumlah keluarga fakir miskin menurut data Pusdatinkesos tahun 2008 sebanyak 3.274.060 KK. Jumlah ini akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.456.521 KK dan Keluarga Rentan (KR) sebanyak 1.885.014 KK (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2008). Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.

b. Ketelantaran

Ketelantaran disini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah balita telantar 299.127 balita, dan anak telantar 2.250.152 anak, anak jalanan 109.454 anak. (Sumber: Pusdatin Kesejahteraan Sosial). Sementara itu, jumlah lanjut usia telantar pada tahun 2008 telah mencapai 1.644.002 lansia. Data ini menunjukkan sebanyak 23,29 persen dari jumlah data PMKS masuk pada kriteria kelompok telantar. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelebagaan para lanjut usia. Seperti halnya permasalahan anak telantar, maka permasalahan utama yang dihadapi Kementerian Sosial adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah,

karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuh-kembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah ketelantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta orang atau 7,6 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat menjadi 22 juta orang dari jumlah penduduk pada tahun 2020. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar kualitas hidup mereka terjamin sampai kematian.

c. Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan. Jumlah penyandang cacat berdasarkan Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 sebanyak 1.544.184 orang, (meliputi cacat fisik, mental, cacat ganda). Namun demikian, jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang ada. Hal ini karena keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami kecacatan sering kali menyembunyikannya sehingga penyandang cacat tidak dapat tersentuh pelayanan.

d. Keterpencilan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 229.479 KK komunitas adat terpencil yang tersebar di 182 lokasi, 158 desa, 139 kecamatan, 82 kabupaten di 30 provinsi (Sumber: Direktorat PKAT). Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait dengan HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau

oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada suatu arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PMKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalahgunaan Napza serta penderita HIV/AIDS. Masalah kesejahteraan sosial berupa ketunaan sosial menyangkut 239.699 orang, yang terdiri atas tunasusila 63.661 orang, pengemis 35.057 orang, gelandangan 25.169 orang, dan eks napi 115.820 orang, penderita HIV/AIDS 11,483 orang dan penyalahgunaan Napza 80.269 orang. Sementara jumlah penyimpangan perilaku belum ada datanya. (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2008). Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaansosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu. Potret permasalahan lainnya adalah

semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi pada semua tingkat usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak.

f. Korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut di antara pulau-pulau. Namun, terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,5 triliun setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2008 telah mengakibatkan korban sebanyak 1.608.829 jiwa (73%), 258.056 jiwa (12%) korban bencana sosial, 190.927 jiwa (9%) korban tindak kekerasan, 142.554 (6%) pekerja migran telantar. Kejadian alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis, keadaan geologis, iklim, dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam di mana terdapat 500 gunung api (129 aktif), terdiri atas kepulauan (2/3 air), 500 sungai besar dan kecil (30 persen) yang melintasi permukiman

padat penduduk. Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat.

Permasalahan pengungsi akibat bencana sosial yang pada awal 2004 menyangkut 2,5 juta orang, sampai dengan tahun 2008 telah diselesaikan semua melalui program relokasi dan pemulangan ke daerah asal. Berbagai konflik dan kerusakan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat di tanah air. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Untuk itu, penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI

Puslitbangkesos memerlukan visi dalam menjalankan programnya agar terarah dalam mencapai tujuan. Visi tersebut tentunya harus disesuaikan instansi induknya yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya maka visi Puslitbangkesos adalah " Inovatif dan Kompetitif dalam Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Sosial".

Visi ini mengandung arti bahwa Puslitbangkesos merupakan fungsi penunjang dari Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil, merata dan berkualitas. Diharapkan penelitian yang dihasilkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dengan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada unit operasional pada Kementerian Sosial dan kepada publik. Dengan komunikasi tersebut sehingga akan terbentuk hubungan yang saling membutuhkan dalam mencapai visi tersebut.

Visi tersebut harus memperhatikan bahwa upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial didasari dengan landasan bahwa warga negara mempunyai

hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan visi tersebut diharapkan Kementerian Sosial mampu untuk mengikuti dinamika pembangunan Indonesia kedepan dalam mengatasi tantangan-tantangan baru berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.

2.2 MISI

1. Meningkatkan Mutu dan Pendayagunaan Manfaat Hasil Penelitian dalam Perumusan Kebijakan
2. Meningkatkan Profesionalisme Dinamika Perangkat Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan Budaya Kerja dan Iklim Inovatif yang Kondusif bagi Perkembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan
4. Memperkuat Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam dan Luar Negeri

2.3 TUJUAN

- a. Peningkatan hasil-hasil penelitian kebijakan dimanfaatkan oleh unit-unit teknis Kementerian Sosial dan para pihak terkait
- b. Peningkatan hasil-hasil penelitian kebijakan dalam mendasari perumusan kebijakan Kementerian Sosial

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Puslitbangkesos berdasarkan renstra (*review*) diarahkan untuk mendukung “hasil penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan unit teknis dan mendasari

perumusan kebijakan”. Oleh karena itu, ditetapkan sasaran strategis berdasarkan kriteria SMART, yaitu: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound* sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Hasil Penelitian;
- b. Meningkatnya Kapasitas SDM Kelitbangan;
- c. Meningkatnya Manajemen Kelitbangan;
- d. Meningkatnya Diseminasi Kelitbangan;
- e. Meningkatnya Jaringan Kerjasama Kelitbangan.

2.5. INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra (*review*) 2013-2014 Puslitbangkesos serta untuk mengukur capaian sasaran tersebut, ditetapkan indikator Puslitbangkesos sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Output.
 - a. Jumlah penelitian dan pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan;
 - b. Jumlah rekomendasi kebijakan penelitian bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Jumlah kegiatan pengembangan SDM kelitbangan;
 - d. Jumlah kegiatan manajemen kelitbangan;
 - e. Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Jumlah peningkatan sarana dan prsarana;
 - g. Jumlah kegiatan diseminasi yang dilaksanakan;
 - h. Jumlah kegiatan kerjasama bidang penelitian yang dilaksanakan.
2. Indikator Kinerja Outcome.
 - Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang mendasari perumusan kebijakan.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah dan kebijakan strategis nasional yang tertuang dalam RPJM 2010-2014 meliputi 11 prioritas nasional yaitu:

- a. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Penanggulangan kemiskinan;
- e. Ketahanan pangan;
- f. Infrastruktur;
- g. Iklim investasi dan usaha;
- h. Energi;
- i. Lingkungan hidup dan bencana;
- j. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
- k. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Kesebelas prioritas nasional tersebut Puslitbangkesos berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL

Tujuannya, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam lingkup kebijakan sosial. Dengan melakukan perumusan naskah kebijakan sosial dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. Pengembangan penyelenggaraan penelitian kesejahteraan sosial sebagai acuan pelaksanaan pelatihan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya peneliti kesejahteraan sosial;
- d. Peningkatan kualitas jaringan kelembagaan penelitian dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas SDM internal melalui pelaksanaan penelitian bersama di tingkat nasional dan internasional; dan
- f. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian kesejahteraan sosial.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSLITBANGKESOS

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi serta pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial. Setelah mengetahui potensi, sumber dan berbagai kelemahan yang diuraikan di atas maka diperlukan penataan aparatur kelembagaan yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi

Puslitbangkesos adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan, penjaminan mutu, kerja sama, dan diseminasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaa kebijakan di bidang analisis kebutuhan, penjaminan mutu, kerja sama, dan diseminasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang analisis kebutuhan, penjaminan mutu, kerjasama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan penjaminan mutu, kerja sama, dan diseminasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, dan rumah tangga pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Puslitbangkesos terdiri atas satu bagian dan dua bidang antara lain :

- a. Bagian Tata Usaha; mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- 2) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian Tata Usaha dibagi dalam dua subbagian yaitu :

- 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan.
 - 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Bidang Analisis Kebutuhan dan Penjamin Mutu; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan dan penjaminan mutu di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyiapan dan pelaksanaan analisis kebutuhan di bidang penelitian dan pengembangan.
 - 2) Penyiapan dan pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penjamin Mutu dibagi dua Subbidang tugas yang terdiri atas:

- 1) Subbidang Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan.
- 2) Subbidang Penjamin Mutu, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan

penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan.

c. Bidang Kerja Sama dan Diseminasi, mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan.
- 2) Penyiapan dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

Pembagian tugasnya, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi dibagi dalam dua Subbidang yang terdiri atas:

- 1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan.
- 2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

3.3.1 Kebijakan Puslitbangkesos

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada (i) RPJMN Tahun 2010-2014, (ii) evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2009, (iii) kebijakan sebelas prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan (iv) komitmen pemerintah pada konvensi internasional mengenai kemiskinan, khususnya tentang penurunan separuh penduduk miskin dunia hingga tahun 2015 yang termuat dalam konvensi *Millenium Development Goals* (MDGs), dan (v) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (vi) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Selain itu arah dan kebijakan ini juga memperhatikan UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional.

Arah kebijakan Puslitbangkesos yang mengacu dari RPJM adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi kinerja penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, mulai dari penyusunan term of reference (TOR), pelaksanaan pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan, seminar hasil penelitian, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (internal, eksternal). Melalui rangkaian tersebut diharapkan hasil-hasil penelitian dapat menjawab kebutuhan unit teknis, para pihak terkait dan mendasari perumusan kebijakan Kementerian Sosial.
- b. Profesionalisasi manajemen pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi: ketatausahaan dan perencanaan, analisis kebutuhan dan penjamin mutu.
- c. Optimalisasi sumber daya kelitbangan: SDM, dana, dan sarana prasarana.
- d. Peningkatan jejaring kerja sama dan diseminasi dengan berbagai pihak, dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan, peningkatan SDM serta pemanfaatan sumber (resource sharing).

3.3.2 Strategi Puslitbangkesos

Dalam kerangka meningkatkan kontribusi Puslitbangkesos bagi Kementerian Sosial khususnya dan pembangunan nasional

pada umumnya, serta berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran maka strategi Puslitbangkesos diarahkan pada :

- a. Topik penelitian dan pengembangan dipilih dengan pertimbangan marketable, applicable dan valueable.
- b. Responship terhadap isu aktual di masyarakat, agar Puslitbangkesos dapat segera menyediakan bahan pertimbangan ilmiah dan aktual bagi pimpinan kementerian dalam mengatasi permasalahan yang berkembang.
- c. Publikasi hasil-hasil penelitian sebagai sarana komunikasi antara peneliti dan masyarakat pengguna melalui seminar, pameran, workshop, internet dan media massa.
- d. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti short course, pelatihan, seminar, lokakarya, dan workshop.
- e. Upaya peningkatan pendidikan formal bagi pegawai terutama pada tingkat magister dan doktor untuk mendukung kinerja organisasi dan keberlanjutan SDM Kelitbang.

3.3.3. Kegiatan Puslitbangkesos

Kegiatan review renstra Puslitbangkesos 2010-2014 pada tahun ke 3 pelaksanaannya berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penelitian dan pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos menyelenggarakan penelitian kebijakan kesejahteraan sosial.

Jenis-jenis penelitian (sub kegiatan) yang dikembangkan Puslitbang Kesejahteraan Sosial adalah :

- a) Penelitian Unggulan

Penelitian Unggulan adalah penelitian yang didasarkan pada program-program prioritas nasional.

b) Penelitian Mandiri

Penelitian Mandiri adalah penelitian yang didasarkan pada program-program prioritas Kementerian Sosial.

c) Penelitian Kerjasama

Penelitian Kerjasama adalah penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama pada program-program prioritas nasional, prioritas Kementerian Sosial, prioritas Kementerian/Lembaga dan prioritas Pemerintah Daerah, NGO's serta isu-isu aktual / strategis.

d) Penelitian Pemula

Penelitian Pemula adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti Pertama dan Peneliti Muda, didasarkan pada salah satu aspek kebijakan dan program Kementerian Sosial dan prioritas nasional, serta kebijakan dan program-program pada Unit Teknis di Kementerian Sosial

e) Quick Research

Penelitian Cepat (*Quick research*) adalah penelitian yang didasarkan pada isu-isu aktual dan bersifat mendesak/strategis, yang memerlukan solusi segera oleh Kementerian Sosial, dan atau mengevaluasi efektivitas implementasi program kesejahteraan sosial secara cepat.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan penelitian kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun naskah kebijakan hasil-hasil penelitian kebijakan

- 2) Melakukan analisis kebutuhan penelitian kebijakan
 - 3) Melakukan evaluasi manfaat hasil penelitian
 - 4) Menyusun pedoman pelaksanaan penelitian kebijakan dan penjaminan mutu.
- c. Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM Kelitbangan.

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan Integritas SDM Kelitbangan.
 - 2) Penyelenggaraan forum fungsional peneliti
 - 3) Penyelenggaraan pembinaan ilmiah Kelitbangan (PPI)
 - 4) Penyelenggaraan penilaian peneliti instansi (TP2I)
 - 5) Penyelenggaraan penilaian jabatan fungsional litkayasa
 - 6) Penyelenggaraan workshop metodologi penelitian
 - 7) Penyelenggaraan bedah buku.
 - 8) Pengiriman pegawai untuk mengikuti seminar, rapat dan diklat.
- d. Jumlah kegiatan manajemen Kelitbangan

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai
- 2) Mengikuti kegiatan koordinasi dan sinergi ke dalam dan ke luar
- 3) Penyelenggaraan evaluasi kegiatan Kelitbangan
- 4) Penyelenggaraan tata laksana Kelitbangan
- 5) Kegiatan penyusunan road map reformasi birokrasi

e. Jumlah kegiatan Diseminasi kelitbangan

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Diseminasi hasil-hasil penelitian kebijakan
- 2) Konferensi nasional hasil-hasil penelitian kebijakan
- 3) Penerbitan eksekutif summary hasil-hasil penelitian kebijakan
- 4) Penerbitan majalah ilmiah (jurnal dan majalah)
- 5) Penyelenggaraan perpustakaan,
- 6) Pameran expo hasil-hasil penelitian kebijakan, dan
- 7) Penyebaran hasil-hasil penelitian kebijakan melalui website.

f. Jumlah kegiatan kerjasama bidang penelitian

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Forum Komunikasi Kelitbangan
- 2) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait
- 3) Kerjasama dengan perguruan tinggi
- 4) Rintisan kerjasama dengan badan litbang daerah.

g. Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelitbangan
- 2) Penyusunan SAI dan SABMN Kelitbangan
- 3) Penyusunan perencanaan anggaran Kelitbangan
- 4) Penyusunan LAKIP

- 5) Penyusunan Laporan Tahunan
 - 6) Penyusunan Renstra 2015-2019
- h. Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Kelitbangan
- Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut Puslitbangkesos melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua)
 - 2) Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat)
 - 3) Pemeliharaan peralatan kantor
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana Kelitbangan
 - 5) Pemeliharaan jaringan dan jasa

BAB IV PENUTUP

Sebagai upaya mengakomodasi perubahan kebijakan dan perkembangan masyarakat dengan segala implikasinya, dipandang perlu dilakukan review renstra 2010 – 2014. Renstra hasil review ini akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Puslitbangkesos satu tahun ke depan.

Review ini dilaksanakan juga dalam upaya melakukan harmonisasi, antara Renstra Puslitbangkesos dengan Renstra Badiklitkesos. Sehingga diperoleh benang merah antara sasaran strategis yang ada di Badiklitkesos dengan sasaran strtegis yang ada di Puslitbangkesos.

Selanjutnya, renstra hasil review ini akan menjadi dasar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Puslitbangkesos. Berkaitan dengan itu, diperlukan komitmen, kerja keras dan koordinasi, baik secara internal maupun eksternal, agar tujuan yang telah ditetapkan di dalam renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan renstra Puslitbangkesos, dalam melakukan penilaian diharapkan dapat memperhatikan capaian kinerja output yang dilaksanakan oleh masing-masing sub bidang dan kebijakan pengalokasiaan anggaran. Sedangkan, untuk melihat outcome renstra Puslitbangkesos dapat dilihat dari keterkaitan hasil-hasil penelitian kebijakan dengan program

dan kegiatan unit-unit teknis di Kementerian Sosial. Baik yang mendasari kebijakan maupun yang mendukung informasi capaian program atau kegiatan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lampiran I : Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Target Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2010-2014

| | | TARGET | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian | 5 judul penelitian 1 quick research | 7 judul penelitian 1 quick research | 5 judul penelitian 1 quick research | 9 judul penelitian 4 quick research - 5 judul - 1 judul - 2 judul - 1 judul - 1 judul | 4 judul penelitian 3 quick research - 3 judul - 1 judul - 3 judul |
| | A. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Sosial: - Penelitian Unggulan - Penelitian Kerjasama - Penelitian Mandiri - Penelitian Pemula - Quick Research | | | | | |
| | B. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penelitian Kesejahteraan Sosial | 8 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 9 Rekomendasi |
| 2 | Meningkatnya kapasitas SDM Kelitbangan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan |

| | | TARGET | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3 | Meningkatnya Manajemen Kelitimbangan | 6 Kegiatan 10 Dokumen | 6 Kegiatan 16 Dokumen | 6 Kegiatan 13 Dokumen | 6 Kegiatan 11 Dokumen | 6 Kegiatan 6 Dokumen |
| | A. Jumlah kegiatan manajemen kelitimbangan; B. Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan; C. Jumlah peningkatan sarana dan prasarana: | | | | | |
| | - Pengadaan Kendaraan Roda 4 | - | - | - | 2 unit | 1 unit |
| | - Pengadaan Kendaraan Roda 2 | - | - | 1 unit | - | - |
| | - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 unit | 3 unit | - | 9 unit | 31 unit | 27 unit |
| | - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor | 5 unit | - | 49 unit | 108 unit | 1 unit |
| 4 | Meningkatnya diseminasi Kelitimbangan | 4 Kegiatan | 14 Kegiatan | 8 Kegiatan | 6 Kegiatan | 7 Kegiatan |
| 5 | Meningkatnya jaringan kerjasama Kelitimbangan | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan |
| ANGGARAN | | Rp 8,435,362,000 | Rp 12,043,925,000 | Rp 10,792,853,000 | Rp 19,740,822,000 | Rp 14,160,627,000 |